

**Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap  
Pencemaran Air Limbah Hasil Usaha Pengolahan Ikan (Studi Kasus Di Desa  
Kedugrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Perda  
No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air)**

Anita Fauziati  
(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember)  
anita\_fauziati@yahoo.com

1. Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan serta bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan di Desa Kedugrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air secara Administratif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 s/d September 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan yaitu melalui sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup kepada perusahaan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan baik mengenai perizinan, pelaporan air limbah, maupun pemasangan IPAL. Yaitu Sanksi administratif berupa teguran tertulis, Sanksi administratif paksaan pemerintah, Sanksi administratif pembekuan izin, Sanksi administratif pencabutan izin. Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu berupa kegiatan pembinaan dan pengawasan kunjungan kelapangan, sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan dan mengadakan acara Festival kali bersih.

Kata Kunci : Pemerintah, Kabupaten Banyuwangi, Pencemaran, Air Limbah dan Sanksi Administratif

Abstrac

This study aims to determine the extent of the role of the Banyuwangi District Government in tackling the pollution of wastewater from fish processing and the responsibility of the Banyuwangi District Government in tackling the pollution of wastewater from fish processing in Kedugrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency. 3 of 2011 concerning Water Pollution Control Administratively. This research was conducted in August 2018 until September 2018. The research method used in writing this essay is a method that is directed and systematic as a way to find, develop and test the truth. The results showed that the responsibility of the Banyuwangi District Government in overcoming the

pollution of wastewater from fish processing business was through sanctions given by the Banyuwangi Regency Government through the Environmental Service to companies that did not comply with legislation regarding licensing, waste water reporting, and installation WWTP. Namely administrative sanctions in the form of written warning, administrative coercion sanctions, administrative sanctions for freezing permits, administrative sanctions for revocation of licenses. In addition, other efforts were carried out by the Office of the Environment in the form of fostering and supervising field visits, socializing to companies and holding clean Festival events.

**Keywords:** Government, Banyuwangi Regency, Pollution, Wastewater and Administrative Sanctions.